



**LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KALURAHAN  
(LKPPK)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN  
TRIMURTI**

**KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**Jalan Srandakan Km. 01 Trimurti Srandakan Bantul 55762**

**LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KALURAHAN  
(LKPPK) AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SRANDAKAN  
KALURAHAN TRIMURTI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦫꦶꦩꦸꦫꦠꦶ

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti, Srandakan Bantul 55762 Telp. (0274) 6464746  
Email : [desa.trimurti@bantulkab.go.id](mailto:desa.trimurti@bantulkab.go.id) , website: <http://trimurti-bantul.desa.id>

Trimurti, 30 Maret 2026

Nomor: B/000.7.2.8/00001/TRIMURTI/2026

Lamp. : 1 bendel

Hal : Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan  
Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun  
Anggaran 2025

Kepada Yth :

**Ketua Bamuskal Trimurti**

di-

**TRIMURTI**

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua Bamuskal Trimurti, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan pemeriksa adanya.



Lurah Trimurti

**AGUS PURWAKA, ST.**

## **KATA PENGANTAR**

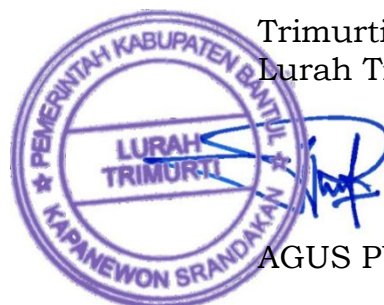
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kalurahan selama satu tahun. Penyusunan LKPPK Akhir Tahun Anggaran ini, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Kalurahan, Lembaga Kalurahan, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPK ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota Bamuskal sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan Kalurahan dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kalurahan Trimurti serta semua pihak yang berkepentingan.



Trimurti, 30 Maret 2026  
Lurah Trimurti

AGUS PURWAKA, ST.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan .....	2
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan .....	3
1.5. Strategi dan Kebijakan .....	5

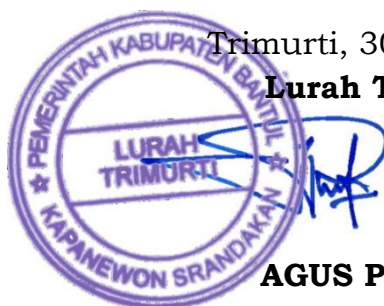
### BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	6
2.2. Program Kerja .....	10
2.3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan .....	10
2.4. Keberhasilan yang dicapai.....	19
2.5. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh .....	29

BAB III PENUTUP.....	29
----------------------	----

### LAMPIRAN

1. Data Peraturan Kalurahan
2. Data Peraturan Lurah
3. Data Keputusan Lurah
4. Data Regulasi Kalurahan



Trimurti, 30 Maret 2026

**Lurah Trimurti**

**AGUS PURWAKA, ST.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Kalurahan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Kalurahan bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Kalurahan selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. LKPPK ini juga melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

### **1.2. Dasar Hukum**

- a.** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- c.** Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- d.** Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- i. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- j. Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan;
- k. Surat Edarah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/23880 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kelurahan yang Bersumber dari Dana Keistimewaan;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- n. Peraturan Kelurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026; (Lembaran Kelurahan Trimurti Tahun 2025 Nomor 06) ;
- o. Peraturan Kelurahan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun anggaran 2026 (Lembaran Kelurahan Trimurti Tahun 2025 Nomor 09 );

### **13. Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar Kalurahan memiliki dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

#### **14. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMK, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

##### **a. Visi Kalurahan**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Trimurti harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 8 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Trimurti adalah sebagai berikut :

#### **TERWUJUDNYA KALURAHAN TRIMURTI SEBAGAI “GERBANG UTAMA” BANTUL.**

#### **“GERBANG UTAMA” :GERAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk

mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

**b. Misi Kalurahan**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa enam tahun.

Lurah Trimurti seperti yang sudah dijabarkan di atas, dalam melaksanakan visinya, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah **Misi Kalurahan Trimurti** sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kalurahan maupun pedukuhan serta kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, demokratis, agamis dan berbudaya dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas perhatian pada ibu hamil dan menyusui serta balita, remaja dan lansia bersama-sama dengan kader desa, puskesmas dan instansi terkait lainnya.
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kalurahan Trimurti dengan prioritas perhatian pendidikan anak usia dini dan TK termasuk pengelola dan sarana prasarannya.
5. Mengembangkan Kalurahan Trimurti sebagai desa persinggahan yang menunjang pengembangan jalur wisata, jalur bandara "NYIA", jalur lintas provinsi maupun wajah depan Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kegiatan perekonomian, kewirausahaan, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan dan optimalisasi peranan BUMKal untuk mengembangkan sumber daya dan potensi Kalurahan serta pendapatan asli Kalurahan.
7. Mengoptimalkan kegiatan generasi muda melalui olahraga, seni, budaya, keagamaan dan kegiatan lainnya agar tercipta generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia.
8. Secara bertahap mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan kegiatan pelatihan maupun peluang usaha bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Pembinaan dan pengembangan kegiatan seni, budaya dan home industry sebagai potensi unggulan Kalurahan.

10. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan yang ada dengan intensifikasi maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembangunan Kalurahan yang berwawasan lingkungan di semua padukuhan.

## **15. Strategi dan Kebijakan**

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Kalurahan diawali dengan Musyawarah Kalurahan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kalurahan dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kalurahan dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga rutin mengadakan kegiatan bersama Lurah, dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Kalurahan adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kalurahan menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Government* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Kalurahan, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan seperti *web* Kalurahan dengan alamat <https://trimurti-bantul.desa.id>, *facebook* Kalurahan Trimurti dengan nama Kalurahan Trimurti, *instagram* Kalurahan Trimurti, dan *e-mail* dengan alamat [desa.trimurti@bantulkab.go.id](mailto:desa.trimurti@bantulkab.go.id), dan *Youtube* Desa Trimurti, *Youtube* Kalurahan Budaya Trimurti Kapanewon Srandakan.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Kalurahan yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh RT di wilayah Kalurahan diberi dana stimulan dari APBKal untuk membangun lingkungannya masing-masing dengan cara swadaya masyarakat.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Kalurahan berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan cara terbuka.

## BAB II

### LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

#### 2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan juga mengacu kepada Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2026 dan Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025.

##### a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Kalurahan yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 9 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.
2. Jumlah Peraturan Lurah Desa yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 5 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.
3. Jumlah Keputusan Lurah Desa yang dibuat selama tahun 2025 sebanyak 64 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.

##### b. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk
  - Jumlah Jiwa : 18.071 Jiwa
  - Laki-laki : 9.006 Jiwa
  - Perempuan : 9.065 Jiwa
  - Jumlah KK : 6.536 KK

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Umur 00-04	496	448	944
Umur 05-09	611	559	1170
Umur 10-14	613	628	1241
Umur 15-19	657	614	1271
Umur 20-24	602	591	1193
Umur 25-29	621	605	1226
Umur 30-34	604	630	1234
Umur 35-39	627	591	1218
Umur 40-44	670	620	1290
Umur 45-49	667	647	1314
Umur 50-54	592	609	1201
Umur 55-59	653	638	1291
Umur 60-64	545	626	1171
Umur 65-69	426	430	856
Umur 70-74	281	313	594
Umur 75 keatas	341	516	857
Jumlah	9006	9065	18071

## 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
TIDAK/BLM SEKOLAH	1611	1643	3254
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	712	716	1428
TAMAT SD/SEDERAJAT	1386	1464	2850
SLTP/SEDERAJAT	1327	1212	2539
SLTA/SEDERAJAT	3206	2993	6199
DIPLOMA I/II	71	86	157
AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	154	241	392
DIPLOMA IV/STRATA I	500	667	1167
STRATA-II	38	42	81
STRATA-III	1	1	2
Jumlah	9006	9065	18071

## 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

JENIS PEKERJAAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
BELUM/TIDAK BEKERJA	1664	1614	3278
MENGURUS RUMAH TANGGA	1	1094	1095
PELAJAR/MAHASISWA	1646	1545	3191
PENSIUNAN	191	142	333
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	152	216	368
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	26	0	26
KEPOLISIAN RI (POLRI)	36	4	40
PERDAGANGAN	17	47	64
PETANI/PEKEBUN	26	16	42

PETERNAK	1	1	2
INDUSTRI	3	0	3
KONSTRUKSI	1	0	1
TRANSPORTASI	1	0	1
KARYAWAN SWASTA	920	750	1670
KARYAWAN BUMN	32	11	43
KARYAWAN BUMD	1	5	6
KARYAWAN HONORER	23	36	59
BURUH HARIAN LEPAS	1061	558	1619
BURUH TANI/PERKEBUNAN	1501	1300	2801
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1	0	1
BURUH PETERNAKAN	6	1	7
PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	8	8
TUKANG CUKUR	3	0	3
TUKANG BATU	37	0	37
TUKANG KAYU	8	0	8
TUKANG SOL SEPATU	2	0	2
TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	0	1
TUKANG JAHIT	4	14	18
PENATA RIAS	1	4	5
PENATA RAMBUT	1	2	3
MEKANIK	7	0	7
SENIMAN	10	3	13
TABIB	1	0	1
PENTERJEMAH	1	0	1
WARTAWAN	1	0	1
USTADZ/MUBALIGH	1	0	1
JURU MASAK	0	1	1
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	1	0	1
DOSEN	6	3	9
GURU	56	119	175
ARSITEK	3	0	3
KONSULTAN	0	1	1
DOKTER	1	3	4
BIDAN	0	14	14
PERAWAT	7	21	28
APOTEKER	0	2	2
PENYIAR RADIO	0	1	1
SOPIR	46	0	46
PEDAGANG	63	133	196
PERANGKAT DESA	19	6	25
KEPALA DESA	1	0	1
WIRASWASTA	1355	1260	2615
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	59	125	184
PEKERJAAN LAINNYA	1	5	6
Jumlah	9006	9065	18071

### **c. Pertanian**

#### 1. Luas Tanah

- LuasTanah : 618,8000 ha
- SudahBersertifikat : 98,6 %
- BelumBersertifikat : 1,4%
- TanahKasDesa : 32 ha

#### 2. Peruntukan

- Jalan : 96,31 ha
- Pekarangan/Perumahan : 442,27 ha
- Persawahan : 40,97 ha
- Bangunan Umum : 135,56 ha

### **d. Manajemen Pemerintahan**

- Lurah : 1 orang
- Carik : 1 orang
- Dukuh : 19 orang
- Jagabaya : 0 orang
- Ulu-ulu : 1 orang
- Kamituwo : 1 orang
- Kepala Urusan Tata Laksana: 1 orang
- Kepala Urusan Danarta : 1 orang
- Kepala Urusan Pangripta : 1 orang
- Staf TU : 1 orang
- Tenaga Bantu Administrasi : 10 orang
- Tenaga Kebersihan : 2 orang
- Jumlah Anggota BPD : 9 orang
- Jumlah Anggota LPMD : 22 orang
- Musrenbang Desa : 1 kali

### **e. Ketentraman dan Ketertiban**

- Jumlah Anggota LinmasPa : 101 orang
- Jumlah Anggota LinmasPi : 2 orang
- JumlahPoskamling : 52 unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam : -
- Jumlah Operasi Penertiban : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

#### **f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan**

- RT/RW : 135 orang
- PKK : 34 orang
- Karang Taruna : 75 orang
- Posyandu : 20 Posyandu
- LPMK : 19 LPMK
- BUMKad : 1 organisasi
- Kelompok Tani : 2 organisasi
- Linmas PA &PI : 103 Orang
- Lembaga Kebudayaan : 1 organisasi
- Lembaga Pendidikan Dini : 20 PAUD

#### **2.2. Program Kerja**

Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur Kalurahan yang mengacu pada Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2025 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 -2026 dan Peraturan Desa Trimurti Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 yang meliputi:

- a. Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- b. Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
- c. Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
- d. Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- e. Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

#### **2.3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan**

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kalurahan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Kalurahan telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

**a. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan**

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 8.069.263.815,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 3.560.567.172,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.541.047.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.688.105.847,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 620.230.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp. 223.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 8.633.150.019,00
Surplus/Defisit	( Rp. 563.886.204,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 582.391.539,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 18.505.335,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 563.886.204,00
4. Silpa Tahun Berjalan	Rp. 0,00

**b. Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan**

Setelah APBKalurahan disahkan bersama Bamuskal, Pemerintah Kalurahan mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Anggaran Perubahan Pertama Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan	
Semula	Rp. 8.069.263.815,00
Berkurang	Rp. 1.049.819.200 ,00
Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp. 7.019.444.615,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Semula	Rp. 3.560.567.172,00
Berkurang	(Rp. 1.069.819.200 ,00)
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 2.490.747.972,00

b. Bidang Pembangunan	
Semula	Rp. 2.541.047.000 ,00
Berkurang	Rp. 154.050.000 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2.386.997.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Semula	Rp. 1.688.105.847 ,00
Bertambah	Rp. 374.600.000 ,00
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan	Rp. 1.313.505.847 ,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Semula	Rp. 620.230.000 ,00
Berkurang	Rp. 100.050.000 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp. 720.280.000 ,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat & Mendesak Kalurahan	
Semula	Rp. 223.200.000 ,00
Bertambah	Rp. 0 ,00
Belanja Bidang Tak Terduga setelah perubahan	Rp 223.200.000 ,00
Jumlah Belanja	-
Semula	Rp. 8.816.700.004 ,00
Berkurang	Rp. 1.498.419.200 ,00
Belanja setelah perubahan	Rp. 7.120.280.804 ,00
Surplus/Defisit	
Semula	(Rp. 563.886.204 ,00)
Berkurang	(Rp. 115.286.204 ,00)
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. 448.600.000 ,00
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 582.391.539 ,00
Bertambah	Rp. 0 ,00
Penerimaan Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 582.391.539 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	-
Semula	Rp. 18.505.335 ,00
Bertambah	Rp. 448.600.000 ,00
Pengeluaran Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 467.105.335 ,00

Selisih Pembiayaan ( a – b )		
Semula	Rp.	563.886.204 ,00
Bertambah	Rp.	448.600.000 ,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )		
setelah perubahan	Rp.	115.286.204 ,00

### c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

#### 1. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Kalurahan yang meliputi Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Kalurahan Tahun 2025 sebesar Rp 7.102.855.021,00 (Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) yang berasal dari:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
4.1.1	Hasil Usaha Kalurahan	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMKal	7.590.000,00
4.1.2	Hasil Aset Kalurahan	
4.1.2.1	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	166.334.099,00
4.1.2.7	Hasil Kios Milik Desa	42.051.000,00
4.1.2.90	Banguna Milik Kalurahan	20.245.000,00
4.1.2.99	Lain-lain hasil Aset	392.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	
4.2.1.	Dana Desa	2.243.013.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	360.154.571,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.674.798.000,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Propinsi	1.195.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	1.295.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	
4.3.9.	Bunga Bank	23.277.351,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.102.855.021,00</b>

## 2. Belanja Kalurahan

Dalam kebijakan belanja, pemerintah Kalurahan mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Kalurahan yang dituangkan ke dalam RKP Kalurahan.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

Untuk Tahun Anggaran 2025 total Belanja Kalurahan sebesar Rp 6.680.926.558,00 (Enam Miliar Enam ratus Delapan puluh Juta Sembilan ratus Dua puluh Enam ribu Lima Ratus Lima puluh Delapan Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	JUMLAH( Rp )
1	BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	2.311.544.268,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	1.950.952.964,00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	69.000.000,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan	949.928.000,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Kalurahan	4.640.700,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	136.890.764,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	138.450.000,00
1.1.6	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	26.895.000,00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	137.700.000,00
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.008.500,00
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	117.490.000,00
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	38.750.000,00
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	277.200.000,00

1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	50.876.000,00
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.110.000,00
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	26.766.000,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	72.226.000,00
1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.430.000,00
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan **)	21.737.500,00
1.3.3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	3.550.000,00
1.3.4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	2.738.500,00
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	6.590.000,00
1.3.91	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	15.000.000,00
1.3.93	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	7.180.000,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	132.740.800,00
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APBKal (Reguler)	0,00
1.4.2	Penyelenggaraan Musywaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	21.100.000,00
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll)	20.910.000,00
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	0,00
1.4.7	Penyusunan Laporan Lurah, LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat	2.010.700,00
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	15.325.000,00
1.4.9	Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan	12.000.000,00
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bamuskal	49.290.400,00
1.4.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba	12.104.700,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	104.748.504,00
1.5.6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.748.504,00
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	60.000.000,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	2.233.939.790,00
2,1	Sub Bidang Pendidikan	408.963.900,00
2.1.1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	69.260.000,00

2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	249.132.900,00
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	33.004.000,00
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.682.000,00
2.1.91	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI)	47.885.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	814.634.090,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa	72.000.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	205.492.000,00
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.237.500,00
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	433.513.090,00
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	6.680.000,00
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	13.487.500,00
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	41.500.000,00
2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	22.349.000,00
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10.375.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	342.817.800,00
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	199.976.800,00
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	142.841.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	318.446.000,00
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	256.300.000,00
2.4.8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	8.000.000,00
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	15.000.000,00
2.4.16	Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	39.146.000,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	221.478.000,00
2.5.91	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	221.478.000,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	
2.6.5	Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Transpotasi Kalurahan	80.000.000,00

2.8	Sub Bidang Pariwisata	47.600.000,00
2.8.3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	47.600.000,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.206.844.500,00
3,1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	71.572.500,00
3.1.2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	7.720.000,00
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	8.730.000,00
3.1.4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	18.357.500,00
3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	27.792.500,00
3.1.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	8.972.500,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	542.722.750,00
3.2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	118.330.000,00
3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	19.450.000,00
3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	77.380.250,00
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	42.320.000,00
3.2.91	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	278.580.000,00
3.2.93	Pengembangan Desa Budaya	6.662.500,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	579.239.250,00
3.3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Kalurahan	2.900.000,00
3.3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	29.652.500,00
3.3.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	187.640.000,00
3.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah raga Milik	352.534.250,00
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.512.500,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.310.000,00
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.535.000,00
3.4.3	Pembinaan PKK	4.775.000,00

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	705.398.000,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	203.558.000,00
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	3.558.000,00
4.2.92	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	200.000.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	70.000.000,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan	4.945.000,00
4.3.3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	4.970.000,00
4.3.90	Peningkatan Kapasitas Staf /Tenaga Honorer Kalurahan / Kader Pembangunan Manusia	14.840.000,00
4.3.92	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Kalurahan	45.245.000,00
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	173.870.000,00
4.5.1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	141.190.000,00
4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.600.000,00
4.5.3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	0,00
4.5.90	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi	23.080.000,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	257.970.000,00
4.7.1	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/ Kios Milik Kalurahan	18.830.000,00
4.7.3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	214.300.000,00
4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	24.840.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	223.200.000,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00
5.1.0	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00
5.2.0	Penanganan Keadaan Darurat	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	223.200.000,00
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	00,00
	JUMLAH BELANJA	6.565.689.287,00

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2024 selisih pembiayaan sebesar Rp 433.733.796,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	582.391.539,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	582.391.539,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan Yang Dipisahkan	-
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.2	Penyertaan Modal Kalurahan (BUMKalma)	448.600.000,00
6.2.3	Setor Kembali Pendapatan Trasfer	18.505.335,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	115.286.204,00
	SILPA TAHUN BERJALAN	537.214.667,00

#### 2.4. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2025 Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang cukup berhasil dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah kalurahan meliputi:

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan telah berhasil mempertahankan predikat tertib administrasi baik pada pemerintah desa maupun lembaga desa. Pemerintah Kalurahan juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

## 1. Penyelenggaran Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial

- Pemerintah Kalurahan telah berhasil merealisasikan pengelolaan keuangan yang sangat efektif dan akuntabel sepanjang tahun anggaran, yang ditandai dengan pemenuhan Penghasilan Tetap (Siltap) serta berbagai tunjangan—termasuk tunjangan jabatan, masa kerja, anak, dan istri—bagi Lurah dan Pamong selama 12 bulan penuh dengan capaian yang sangat tinggi dan sesuai target. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan aparatur desa melalui penyaluran hak finansial yang tepat waktu, di mana sedikit selisih yang muncul pada pos Pamong dan THR semata-mata merupakan langkah penyesuaian perhitungan administrasi akhir tahun demi menjamin akurasi pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan yang berlaku.
- Pemerintah Kalurahan telah sukses menjamin perlindungan sosial bagi seluruh Lurah dan Pamong melalui kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang menyeluruh. Meskipun realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, hal ini justru merupakan bentuk efisiensi fiskal yang positif akibat adanya penyesuaian regulasi terkait nominal iuran wajib. Penurunan nilai premi riil dibandingkan dengan angka proyeksi awal penyusunan APBKal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cermat dan adaptif, di mana Pemerintah Kalurahan berhasil memberikan cakupan perlindungan maksimal bagi aparatur dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih hemat dan tetap selaras dengan ketentuan hukum terbaru.
- Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK). Pemerintah Kalurahan telah menunjukkan tata kelola operasional yang sangat disiplin dan efisien sepanjang tahun, dengan keberhasilan memenuhi seluruh kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK),

honorarium PKPK dan PPK, perjalanan dinas, serta biaya operasional kantor secara optimal guna mendukung kelancaran administrasi pemerintahan. Meskipun seluruh target kegiatan tercapai, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 43,8 juta** yang merupakan hasil dari penerapan prinsip selektif dan skala prioritas dalam pengadaan barang-barang yang dinilai belum mendesak. Sisa anggaran ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol yang ketat serta komitmen terhadap efisiensi keuangan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan performa kerja organisasi.

- Penyediaan Tunjangan Bamuskal  
Diberikan pada Bamuskal sejumlah 9 orang selama 12 bulan.
  - Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran) untuk belanja perlengkapan kantor, dan perjalanan dinas.
  - Penyediaan Operasional RT dengan pemberian Intensif RT guna membantu tugas Pemerintahan kalurahan dalam bentuk insentif Ketua RT selama satu tahun per bulan sejumlah Rp 85.000,00
  - Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
  - Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Pamong Kalurahan(Cagunan)
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan
- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan. Pemerintah Kalurahan sukses memenuhi kebutuhan sarana perkantoran melalui optimalisasi aset yang tersedia, sehingga pengadaan aset tetap baru dilakukan secara sangat selektif. Langkah ini menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kelancaran operasional maupun kualitas pelayanan publik.
  - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan. Pemerintah Kalurahan berhasil menjaga efisiensi anggaran pemeliharaan gedung karena kondisi fisik bangunan dan instalasi listrik tetap terjaga dalam keadaan baik. Berkat perawatan rutin yang

optimal, prasarana kantor tetap berfungsi maksimal tanpa memerlukan biaya perbaikan besar sepanjang tahun anggaran.

3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
  - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan : Pengadaan Peralatan Kantor dan ATK, Sosialisasi tentang Kependudukan (KTP Digital)
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan : SDGs : Pemutakhiran data penduduk.
  - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan telah berhasil meningkatkan tata kelola administrasi melalui sistem pengelolaan arsip yang tertib, aman, dan sistematis. Keberhasilan ini memastikan seluruh dokumen penting tersimpan dengan baik, sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.
  - 
  - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif : Anggaran ini digunakan untuk fasilitasi penyelenggaraan Puskesmas Kresna Murti seperti Honor Operator SIKS-NG selama 12 bulan, tinta printer, paket data internet dan ATK, selain itu juga untuk kegiatan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kalurahan.
  - Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker Anggaran digunakan untuk Honor Kader Pembangunan Manusia selama 12 bulan serta operasional pendataan untuk kelengkapan pengisian data di Aplikasi EHDW.
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan: Penyusunan buku Monografi.
4. Tata Praja pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
  - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan
  - Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan NonReguler)
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)

- Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ)
- Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain
- Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan. Pemerintah Kalurahan telah berhasil merealisasikan pengembangan sistem informasi secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan. Keberhasilan ini memastikan infrastruktur digital desa tetap mutakhir dan relevan, sehingga mampu mempercepat alur data serta meningkatkan kualitas layanan informasi bagi masyarakat secara efektif.
- Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa yaitu pengisian Dukuh Cagunan.
- Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman Kontingen dlm Lomdes: Lomba Kalurahan Mandiri Budaya.

#### 5. Sub Bidang Pertanahan

- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Pajak Tanah Kas Kalurahan, Honor Tim PBB, Oprasional Posko PBB dan Reward.
- Pelaksanaan revitalisasi tanah Kas kalurahan sebelah selatan SMA 1 Srandakan dengan mengembalikan lahan menjadi tanah sawah seperti peruntukannya,

#### **b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Pemerintah Kalurahan telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

##### 1. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal : Dilaksanakan pelatihan parenting bagi pendidik tentang Pencegahan Stunting pada anak sekolah, honor guru TK PKK 7 orang dan 49 guru PAUD.
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Bersumber dari dana PPBMP untuk kelengkapan sarana bidang Pendidikan seperti APE, buku, mebelair, alat elektronik, dll. Selain itu juga ada pembinaan

### Pendidik dan Sosialisasi Kampung Layak anak.

- Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga : Rehabilitasi Gedung PAUD DK. Jetis, PAUD DK. Puluhan Kidul dan Tambah daya listrik Gedung PAUD DK. Bendo.
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan : Pembelian Buku Bacaan dan Rak Surat Kabar. Pemerintah Kalurahan sukses memperkaya koleksi buku dan sarana perpustakaan guna meningkatkan literasi warga. Rendahnya realisasi anggaran pada pos ini merupakan hasil efisiensi administratif melalui pengalihan honorarium petugas ke anggaran Staf Bamuskal untuk menghindari tumpang tindih pendanaan tanpa mengurangi kualitas layanan perpustakaan.
- Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) : Kegiatan berupa pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah khususnya TK dan KB sebagai upaya preventif untuk menekan angka stunting di Kalurahan Trimurti.

### 2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dll) : Pemberian Insentif bagi 20 Koordinator Kader Dusun dan 80 Kader Posyandu se Kalurahan Trimurti
- Penyelenggaraan Posyandu : Kegiatan berupa Fasilitasi konsumsi Pelaksanaan Posyandu ILP di 20 Posyandu, pemberian makanan tambahan untuk Balita dan Lansia melalui Posyandu Balita dan Lansia sebagai upaya preventif untuk menekan angka stunting di Kalurahan Trimurti, Dalam kegiatan ini ada pembinaan Posyandu Remaja serta PMT Posyandu remaja Dusun Puron dan Dusun Pedak.
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan : Fasilitasi pertemuan rutin kader desa siaga se-Kalurahan Trimurti, serta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Tuberculosis di Dusun Sapuangin.

- Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD : Bersumber dari dana PPBMP untuk pengadaan kelengkapan sarana alat Kesehatan, APE, mebelair dan Alat Elektronik di Posyandu, serta kegiatan penyuluhan kesehatan di Dusun Puron, Celan, dan Sapuangin.
- Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat: Anggaran digunakan untuk Pertemuan Forum Rumah Kalurahan sehat dan Kegiatan Rembug Stunting sebagai rangkaian perencanaan desa.
- Pembinaan Kampung KB : Fasilitasi pertemuan Pokja kampung KB, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kader BKB dan Fasilitasi pertemuan Tribina di tingkat Dusun.
- Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting : Kegiatan berupa Dapur Sehat Atasi Stunting dengan memberikan PMT Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang sebanyak 25 balita selama 90 hari. Pengolahan PMT Pemulihan dilaksanakan oleh Kader dan diberikan honor memasak.
- Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas : Penerima manfaat kegiatan ini adalah bumil resti (Kekurangan Energi Kronis). Diberikan berupa PMT Pemulihan dengan harapan bisa menaikkan status gizi pada bumil tersebut sehingga bayi terlahir sehat. Penerima Manfaat PMT Pemulihan ini 10 ibu hamil. Pengolahan PMT Pemulihan dilaksanakan oleh Kader dan diberikan honor memasak.
- Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,dll) : Pemberantasan Sarang Nyamuk untuk mencegah kasus DBD di Kalurahan Trimurti, serta kegiatan senam kesehatan jasmani dan kerja bakti bersih lingkungan Kalurahan Trimurti.

### 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang : Corblok Jalan Lingkungan di Pondok DK Srandakan, DK Srandakan RT 02, DK Klurahan RT 18, DK Puluhan Lor RT 58, Mayongan DK.Celan RT 113, DK Sapuangin RT 132.

Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 10 hari dengan menyerap 195 tenaga kerja.

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan : Corblok Jalan di DK. Klurahan RT 20, DK. Gunungsaren Kidul RT 74, DK. Gunungsaren Lor RT 78, DK. Gunungsaren Lor RT 83. Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 9 hari dengan menyerap 181 tenaga kerja.

#### 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni : di DK Proketen, DK Jetis, DK Sawahan, DK Pedak, DK Celan, DK Sapuangin. Pembangunan rumah baru di DK Srandakan, DK. Gerso, DK. Sawahan. Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 12 hari dengan menyerap 159 tenaga kerja.
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga), berupa jasa sedot limbah tahu di DK. Gunungsaren Kidul dan DK Sapuangin.
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum : Rahabilitasi toilet di DK Jetis, DK Gunungsaren Lor. Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 15 hari dengan menyerap 28 tenaga kerja.

#### 6. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah : berupa fasilitasi pengelolaan sampah di DK Srandakan, DK Gerso, DK Klurahan, DK Proketen, DK Jetis, DK Sawahan, DK Puron, DK Puluhan Kidul, DK Pedak, DK Puluhan lor, DK Gunungsaren Lor, DK Nengahan, DK Lopati, DK Bendo, DK Celan, DK Cagunan, DK Mangiran. Dan berupa Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga DK Sapuangin.

#### 7. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana

Penerangan Jalan : berupa Penerangan Jalan Lingkungan di DK Puluhan Kidul RT 52, DK Puron RT 45, DK Bendo RT 98 dan DK Celan RT 116.

#### 8. Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan : berupa pelatihan pembuatan storytelling dan pelatihan guide/pemandu wisata
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan : berupa Penyelenggaraan Festival Pariwisata dan Family Trip “Pesona Trimurti” 2025.

#### **c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Di bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, keberhasilan yang dicapai adalah pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah ragayang meliputi:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah
  - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah kalurahan : Pemberdayaan Linmas dalam bentuk Fasilitasi, penyuluhan kepada linmas.
  - Persiapan Kesiap siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan : Pelatihan penanganan pertama korban kecelakaan air pada FPRB. Penanganan Bencana Alam pa anggota FPRBdan pengadaan peralatan penanganan bencana dan fasilitasi kekeringan warga.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan: Kegiatan bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya, berupa Fasilitasi Upacara Adat Bakda Mangiran, Pentas Selapan Fest sebanyak 3x pementasan dan pengadaan Soundsystem.

- Pengembangan Desa Budaya : berupa Fasilitasi Pertemuan Kalurahan Budaya , Fasilitasi kegiatan pelatihan Macapat, dan Latihan kesenian.
  - Pembinaan Bidang Keagamaan : Pembinaan Kaum Rois se Kalurahan Trimurti sebanyak 36 kaum rois, safari tarawih di 2 Masjid dengan memberikan fasilitas Wireles bagi 2 masjid, syawalan dan pembinaan peserta lomba MTQ.
  - Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi : kegiatan bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya berupa Kegiatan Gelar Potensi Budaya Trimurti Expo, kirab budaya , pengadaa genset untuk mendukung pementasan budaya dan pembuatan buletin.
  - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan : berupa Pembangunan Pavingblok dan finishing lantai Pendopo Budaya Trimurti. Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 24 hari dengan menyerap 175 tenaga kerja.
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan : berupa pembangunan toilet dan ruang ganti di Gedung Futsal Tegalombo dan berupa pemeliharaan sarprasnya. Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 23 hari dengan menyerap 134 tenaga kerja.
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan : Pembangunan (lanjutan) Gedung Futsal di Lapangan Tegalombo. Total waktu pelaksanaan pembangunannya selama 87 hari dengan menyerap 756 tenaga kerja. Dan berupa pemeliharaan Lapangan Kedungbule.
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan dan Pembinaan PKK : Pemberdayaan LKM, Fasilitasi kegiatan LKM, Koordinasi antar kelembagaan LKM dan Studi tiru di Srimartani

#### **d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - Pemberdayaan Peternak Domba dengan Dana Karangkopecengan pembelian domba betina bunting untuk di gaduhkan kepada warga miskin.
  
2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
  - Pelatihan Manajemen Koperasi / KUD/ UMKM berupa pelatihan Pemasaran Produk Unggulan Desa Prima, seperti pembuatan video iklan, dan fasilitasi alat produksi bolu kelapa.
  - Pelatihan/Pembinaan /Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/ Pelaku usaha berupa pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi desa prima, serta fasilitasi laptop dan printer untuk mendukung administrasi usaha desa prima.
  
3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa : berupa fasilitasi pemasaran produk Desa Preneur (Mie letek& minuman botanical air kelapa) secara online dan berupa fasilitasi packing produk Desa Preneur.
  - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif : berupa kegiatan ekspo/pameran UMKM kalurahan Trimurti.

#### **2.5. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh**

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Kalurahan Trimurti, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan selama tahun 2025 antara lain:

1. Sumber daya Manusia yang terbatas sehingga banyak kegiatan tertentu yang kurang maksimal.

2. Regulasi yang ada seringkali kurang maksimal di pahami oleh Stikholder di Kalurahan, sehingga jauh dari yang diharapkan.
3. Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan belum maksimal karena sulitnya pembebasan tanah karena banyak yang dikuasai warga, karena minta ganti rugi dan pendanaannya.
4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa : berupa fasilitasi pemasaran produk Desa Preneur (Mie letheck& minuman botanical air kelapa) secara online dan berupa fasilitasi packing produk Desa Preneur.
  - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif : berupa kegiatan ekspo/pameran UMKM kalurahan Trimurti.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025. Pada intinya, Pemerintah Kalurahan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu atas nama Pemerintah Kalurahan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, dan masyarakat Kalurahan tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga kalurahan atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bamuskal.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Kalurahanhandapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Trimurti, 30 Maret 2026  
Lurah Trimurti



AGUS PURWAKA, ST.



# LAMPIRAN

## DAFTAR PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2025	Pertanggungjawaban Redaksi Pelaksanaan APBKal TA 2024	5 Maret 2025	-
2	02 Tahun 2025	Reviu RPJMKal Kalurahan Trimurti Tahun 2019 - 2026	11 Juni 2025	-
3	03 Tahun 2025	Perubahan RKPKal Tahun 2025	16 Juni 2025	-
4	04 Tahun 2025	Penyertaan Modal Pemkal Trimurti pada BUMDES Trimurti Lestari	30 Juni 2025	-
5	05 Tahun 2025	Perubahan APBKal Tahun 2025	21 Juli 2025	-
6	06 Tahun 2025	RKP 2026	16 Oktober 2025	-
7	07 Tahun 2025	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kalurahan Trimurti	20 Oktober 2025	-
8	08 Tahun 2025	Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staff Kalurahan, Staff Honorer Kalurahan, dan Bamuskal Tahun 2026	30 Desember 2025	-
9	09 Tahun 2025	APBKal Tahun 2026	30 Desember 2025	-

Trimurti, 30 Maret 2026  
**Lurah Trimurti**  
  
**AGUS PURWAKA, ST.**

## DAFTAR PERATURAN LURAH TRIMURTI TAHUN 2025

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2025	Pemanfaatan Tanah Kas / Tanah Kalurahan	02 Januari 2025	-
2	02 Tahun 2025	Pemberian THR bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Staff Honoror Kalurahan	20 Februari 2025	
3	03 Tahun 2025	Petunuk Teknis Bantuan Khusus (BKK) Dana Karangkopek	19 Mei 2025	
4	04 Tahun 2025	Penjabaran Perubahan APBKal Tahun 2025	21 Juli 2025	
5	05 Tahun 2025	Penjabaran APBKal Tahun 2026	31 Desember 2025	-
6	06 Tahun 2025	T e n t a n g Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana desa tahun anggaran 2026	28 Desember 2025	-
7	07 Tahun 2025	Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staff Kalurahan, Staff Honoror Kalurahan, dan Bamuskal	30 Desember 2025	-

Trimurti, 30 Maret 2026  
**Lurah Trimurti**  
  
**AGUS PURWAKA, ST.**

**DAFTAR KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025**

No	Nomor SK	Nama Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2025	Penunjukan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri bantul	02 Januari 2025	-
2	02 Tahun 2025	Penunjukan Register Kependudukan Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	-
3	03 Tahun 2025	TPK Intensifikasi PBB Kalurahan Trimurti Tahun 2025	02 Januari 2025	
4	04 Tahun 2025	Pengangkatan Saudari Badiatus Sholihah sebagai Tyehaga Kontrak Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	
5	05 Tahun 2025	Pengelola Arsip Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	
6	06 Tahun 2025	Pengelola Aset Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	-
7	07 Tahun 2025	Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Admin dan Informasi Kalurahan	02 Januari 2025	
8	08 Tahun 2025	Pembentukan Tim PBJ Kalurahan Trimurti TA 2025	02 Januari 2025	
9	09 Tahun 2025	Pembentukan TPK Pembangunan Tingkat Kalurahan di Kalurahan Trimurti TA 2025	02 Januari 2025	
10	10 Tahun 2025	Pembentukan TPK Pengelolaan / Pengolahan Sampah Tingkat Kalurahan di Kalurahan Trimurti TA 2025	02 Januari 2025	
11	11 Tahun 2025	Pengangkatan Tenaga Pendidik TK PKK dan Guru KB Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	-
12	12 Tahun 2025	Penetapan Pendirian dan Kader Posyandu Balita dan Lansia Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	
13	13 Tahun 2025	Penetapan Kader Posyandu Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	
14	14 Tahun 2025	Pembentukan Susunan Pengurus Harian Rumah Kalurahan Sehat Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	

15	15 Tahun 2025	Pembentukan Pokja Posyandu Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	
16	16 Tahun 2025	Pusat Kesejahteraan Sosial Kresna Murti Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	
17	17 Tahun 2025	Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	-
18	18 Tahun 2025	Penetapan Pusat Kesejahteraan Sosial Kresna Murti Kalurahan Trimurti	02 Januari 2025	-
19	19 Tahun 2025	Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kalurahan Trimurti Tahun 2025	09 Januari 2025	
20	19 A Tahun 2025	Kelompok Voli Armada Timur Gunungsaren Lor	25 Februari 2025	
21	20 Tahun 2025	Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan (Dukuh Cagunan)	25 Maret 2025	-
22	21 Tahun 2025	Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025	10 April 2025	
23	22 Tahun 2025	PPBMP Tahun 2025	10 April 2025	
24	22B Tahun 2025	TPK Inovasi Pengolahan Mie Letek (Yu Murti)	10 April 2025	
25	23 Tahun 2025	Tim Reviu RPJMKal Kalurahan Trimurti	10 April 2025	
26	24 Tahun 2025	Tim Penyusun Perubahan RKPKal tahun 2025	05 Mei 2025	
27	25 Tahun 2025	Pemberhentian Sdr Gunawan Sebagai Jogoboyo	04 Juni 2025	
28	26 Tahun 2025	Pengangkatan Sdr Budi Kuswantara, SH. Sebagai Plt Jogoboyo	04 Juni 2025	
29	27 Tahun 2025	Pemberhentia Sdr Supandi sebagai Dukuh XVII Cagunan	30 Juni 2025	
30	28 Tahun 2025	Pengangkata Saudara Iqwan Primantoro sebagai Dukuh XVII Cagunan	30 Juni 2025	

31	29 Tahun 2025	Tim Pembina POS Pelayanan Terpadu Kalurahan Trimurti 2025-2029	30 Juni 2025	
32	30 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Srikandi Srandakan	30 Juni 2025	
33	31 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Gerso	30 Juni 2025	
34	32 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Melati Klurahan	30 Juni 2025	
35	33 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Menur Proketen	30 Juni 2025	
36	34 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Mekar Murti Jetis	30 Juni 2025	
37	35 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Anggrek Sawahan	30 Juni 2025	
38	36 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Mandiri Puron	30 Juni 2025	
39	37 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Mawar Puluhan Kidul	30 Juni 2025	
40	38 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Melati Puluhan Lor	30 Juni 2025	
41	39 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Cempedak Pedak	30 Juni 2025	
42	40 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Gunungsaren Kidul	30 Juni 2025	
43	41 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Mekar Gunungsaren Lor	30 Juni 2025	
44	42 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Kasih Ibu Nengahan	30 Juni 2025	
45	43 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Mekar Asih Lopati	30 Juni 2025	
46	44 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Melati Bendo	30 Juni 2025	

47	45 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Gotro Celan	30 Juni 2025	
48	46 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Harapan Kita Cagunan	30 Juni 2025	
49	47 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Aster Mangiran	30 Juni 2025	
50	48 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Putra Lestari Sapuangin	30 Juni 2025	
51	49 Tahun 2025	Pengurus Posyandu Bandung DK Gunungsaren Kidul	30 Juni 2025	
52	50 Tahun 2025	Penetapan Tim Analisis Kelayakan Penyertaan Modal Kepada BUMKAL Trimurti Lestari	30 Juni 2025	
53	50 A Tahun 2025	Tim Penyusun RPKAL Tahun 2026	07 Juli 2025	
54	51 Tahun 2025	Admin Dikal	30 Juni 2025	
55	51 A Tahun 2025	Tim Penyusun Profil Kalurahan	28 Juli 2025	
56	52 Tahun 2025	Pengelola Administrasi / Keuangan dan Pengelola Barang TA 2025	28 Juli 2025	
57	53 Tahun 2025	Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kalurahan Trimurti	25 Agustus 2025	
58	54 Tahun 2025	Pengelola GOR GTO Tegal Ombo Nengahan	25 Agustus 2025	
59	55 Tahun 2025	Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kalurahan Trimurti	1 September 2025	
60	56 Tahun 2025	Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Kalurahan Trimurti	1 September 2025	
61	57 Tahun 2025	Pembentukan TPK Penyelenggaraan Lomba Volly Kalurahan Trimurti	1 September 2025	
62	58 tahun 2025	Standar Pelayanan Publik	8 September 2025	

63	59 tahun 2025	Penggunaan Tanah Kalurahan Untuk Gerai Pergudangan dan Kelengkapan KDMP Tahun 2025	25 Oktober 2025	
64	60 Tahun 2025	Penetapan Ketua Rt se Kalurahan Trimurti	29 Desember 2025	
65	61 Tahun 2025	Pengurus PKK Pedukuhan se Kalurahan Trimurti	29 Desember 2025	
66	62 Tahun 2025	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Tahun 2025	29 Desember 2025	
67	63 Tahun 2025	Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak Tahun 2025	29 Desember 2025	-
68	64 Tahun 2025	Furum Anak Kalurahan Trimurti 2025	29 Desember 2025	-

Trimurti 30 Maret 2026

**Lurah Trimurti**



**AGUS PURWAKA, ST**

